Radar Bali

Menelusuri Aset Pemprov Bali yang Diselewengkan

Duo Oknum PNS Gianyar (2-Habis)

Tersangka Tarik SK, Beberapa Lahan Disewakan Lagi

Terungkapnya dugaan penyelewengan dalam pengelolaan aset Pemprov Bali di Gianyar, ternyata membuat tersangka bergerak menemui kembali para penggarap. Apa modusnya?

N. WIDIADNYANA, *Gianyar*

NYOMAN WIDIADNYANA/RADAR BALI

DIMANFAATKAN: Salah satu aset Pemprov Bali di Gianyar yang digunakan sebagai lahan parkir. Ada pula yang dipakai sebagai kandang ternak.

BARU beberapa tahun, SK bodong tersebut dibagikan oknum PNS berinisil NPS dan IBNS kepada para penggarap, ternyata para penggarap kembali terhenyak dengan kedatangan NPS, yang sebelumnya membagikan SK itu. Kedatangan NPS yang salah satunya menemui I Ketut Udiana, penggarap lahan aset Pemprov Bali di Subak Payal, Lingkungan Abianbase Klod Kauh, Kelurahan Abianbase, tak disangka menjadi awal terbongkarnya kasus penyelewengan pengelolaan lahan aset tersebut. "Sebelum saya tahu surat (SK) itu palsu, awalnya saya didatangi NPS ke rumah. Saat itu dia bilang, suratnya mesti ditarik dulu, katanya akan ada perbaikan pada surat itu," ucapnya.

Bahkan, untuk menyakinkan dirinya ditunjukkan pula oleh NPS surat-surat yang sama, dan disebutkan sebelumnya juga diberikan ■

▸ *Baca* ***Tersangka...*** *Hal 31*

Edisi : Senin, 19 Oktober 2015

Hal. : 21

Radar Bali

Jadi Kandang Ternak dan Lahan Parkir

■ TERSANGKA...

Sambungan dari hal 21

kepada para penggarap lahan aset Pemprov Bali yang lain. Karena itulah, dia akhirnya memberikan kembali SK tersebut. Lantaran semenjak didatangi untuk kali pertama, dan mengatakan sebagai pemungut uang sewa lahan aset itu. Para penggarap ini mengira jika SK tersebut memang asli. "Karena dia sempat menunjukkan surat yang sama yang lebih dulu ditarik dari penggarap yang lain. Saya akhirnya ikut mengembalikannya. Sebab saat itu saya kira, memang benar-benar akan akan ada berbaikan," bebernya.

Tapi, seperti sebuah pepatah sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Itulah awal terbongkarnya sepak terjang kedua tersangka. Lantaran berselang beberapa hari setelah SK itu ditarik tersangka, Udiana giliran mendapatkan surat panggilan dari penyidik Kejari Gianyar, terkait lahan aset Pemprov Bali, ini.

Saat itulah dia merasa ada sesuatu yang salah dengan surat yang sebelumnya diberikan, tapi ditarik lagi oleh tersangka. "Ketika saya datang ke kejari dan ketemu jaksa, saya diberitahu jika surat itu palsu, dan saya pun dimintai keterangan oleh jaksa. Saat itu saya bilang apa adanya, sesuai yang saya ketahui," tambahnya.

Namun, saat awal-awal dia diberikan SK, itu dan diminta membayar uang sewa. Sudiana sebenarnya sempat merasa ada yang aneh dan janggal. Sebab hanya lahan-lahan *laba* Pura Besakih di areal Subak Payal Belong dan Subak Belong, Kelurahan Abianbase saja yang mendapatkan SK itu.

Sedangkan lahan sejenis yang tersebar di subak yang lain, seperti di wilayah Desa Serongga, Lebih, hingga Kesian, tidak mendapatkan SK yang sama. Padahal lokasinya tidak terlalu jauh dari lahan yang dia garap.

Namun, karena merasa dirinya hanya sebagai penggarap dan sadar itu tanah pemerintah, dia tak mempermasalahkannya. Apalagi melihat SK yang lengkap dengan cap dan tanda tangan bupati, dia yang hanya seorang petani hanya percaya.

"Saat itu saya sudah curiga, *kok* yang di desa lain tidak dapat surat (SK) itu. Akhirnya kami yang disini membayar karena surat palsu, akhirnya yang dapat masalah. Karena gara-gara surat palsu, itu saya yang dipanggil (Kejari Gianyar)," ungkapnya.

Meski ada oknum pegawai yang bermain, dia berharap lahan tersebut ke depannya tetap bisa dia garap. Karena menurutnya, meski lahan itu hanya seluas 28 are, namun dia dan keluarganya yang sudah puluhan tahun menggarapnya, sangat tahu betul jika lahan tersebut sangat subur. "Selama saya menggarap lahan ini, hasilnya bisa dibilang selalu lebih banyak dibanding lahan yang lain. Makanya selama ini saya tak pernah membiarkannya kosong, dan secara rutin selalu kami tanami padi, diselang-selingi palawija. Supaya kesuburan tanahnya terjaga," imbuh pria yang juga Klian Pekaseh Subak Belong ini.

Diterangkan olehnya, di Subak Belong dan Subak Payal Belong serta Subak Payal Tegle, yang semuanya berada di wilayah Lingkungan Abianbase Klod Kauh, sebenarnya ada enam lahan sejenis dan juga sama-sama mendapatkan SK bodong itu. Selain lahan yang dia garap yang ada di Subak Belong.

Di Subak Payal Belong terdapat dua lahan sejenis yang digarap Dewa Putu Bawa dan Ketut Manas. Sedangkan tiga lainnya ada di Subak Payal Tegle, yang masing-masing digarap Ketut Punduh, Nyoman Dana, dan Ketut Suarmika.

Namun, berbeda dengan lahan yang dia garap yang berada jauh di tengah hijaunya persawahan. Dua tiga lahan lainnya, yakni lahan yang digarap Suarmika, Dana, dan Punduh berada di pinggir jalan yang cukup besar. Bahkan, hasil pantauan di lapangan lahan-lahan itu sebagian sudah beralih fungsi. Ada yang digunakan sebagai kandang dengan ukuran cukup besar. Bahkan, yang posisinya di pinggir jalan langsung ada yang berdiri bangunan semi permanen yang mirip lahan parkir dan disewakan secara khusus.

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Gianyar Herdian Rahadi mengakui jika sampai saat ini memang belum ada penggarap yang terlibat dalam praktik culas tersebut. Sebab, para penggarap yang diberi SK bodong tersebut sesuai hasil penyidikan tidak tahu-menahu mengenai SK bodong mereka. Karena itu pihak Kejari Gianyar sendiri tengah mengintensifkan penyidikan, guna mengungkap ke mana aliran uang sewa yang disetorkan para penggarap kepada para tersangka itu. **(*/rid)**

Edisi : Senin, 19 Oktober 2015
Hal. : 31

Radar Bali

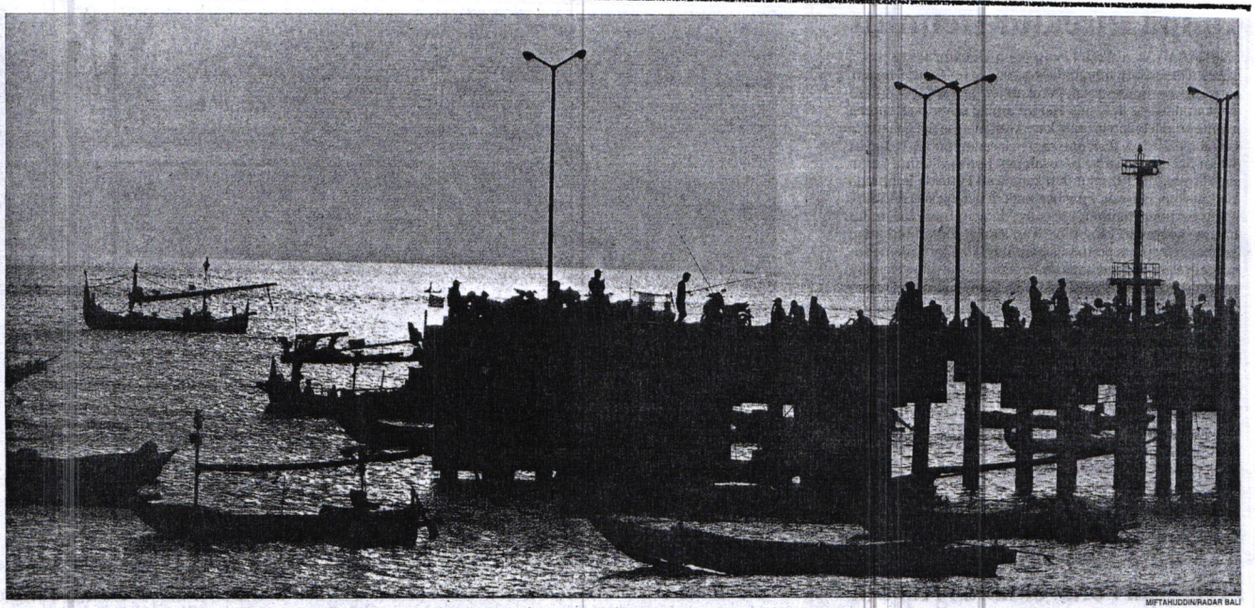

MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

TERTUNDA: Sejumlah warga beraktivitas di Dermaga Kedonganan, Kuta Selatan kemarin sore. Proyek pembuatan breakwater di Kedonganan dibatalkan lantaran waktu mepet.

Rp 24 M Dikembalikan

Penataan Pantai Kedonganan Batal

KUTA - Impian warga Kedonganan untuk menjadikan kawasan Pantai Kedonganan sebagai pusat pariwisata berbasis bahari harus tertunda. Pasalnya, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 24 miliar batal digelontorkan. Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakanlaut) Kabupaten Badung Made Badra mengungkapkan ▪

▸ *Baca **Rp 24 M...** Hal 31*

MENGAPA PENATAAN PANTAI KEDONGANAN BATAL?

- **Nilai Bantuan:** Rp 24 miliar dari APBN 2015
- Dinas Peternakan dan Kelautan Badung baru menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Juni 2015 lalu.
- Proses lelang membutuhkan waktu 24 hari dan pengerjaan proyek memakan waktu 7 bulan.
- Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pantai Kedonganan (BPKP2K), merencanakan konsep Minapolitan dan Minawisata
- Pemkab Badung memilih mengembalikannya ke pusat lantaran mepetnya waktu dan khawatir berisiko jadi temuan BPKP.

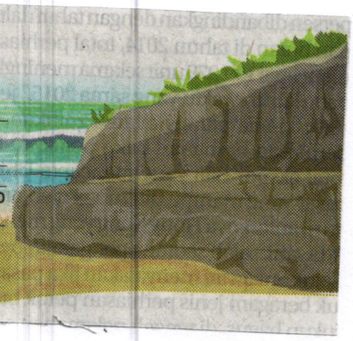

Edisi : Senin, 19 Oktober 2015
Hal. : 21

Radar Bali

Dirancang Konsep Minapolitan dan Minawisata

■ RP 24 M...
Sambungan dari hal 21

pihaknya terpaksa membatalkan sebab jika dipaksakan menurutnya sangat berisiko. "Sementara tahun ini Pantai Kedonganan tidak jadi dapat bantuan. Masalahnya APBN telat datang. Anggaran kami kembalikan karena waktunya sangat mepet untuk melaksanakan proyek," jelas Badra kepada *Jawa Pos Radar Bali*, kemarin (18/10).

Lebih jauh dijelaskan Badra, pihaknya baru menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). DIPA baru diterima pada bulan Juni lalu. Sementara sekarang sudah bulan Oktober.

Proses lelang memakan waktu 24 hari, serta pengerjaan proyek sekitar tujuh bulan. Bila dipaksakan, lanjut Badra, maka akhir tahun 2015 proyek tidak akan selesai. Bantuan APBN sebesar Rp 24 miliar itu sedianya digunakan membangun satu unit break water atau pemecah gelombang senilai Rp 19 miliar. Sisanya akan digunakan membangun senderan pantai penahan abrasi. Bantuan juga akan digunakan untuk menata infrastruktur lain di darat.

Badra mengaku pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPKP Bali. Disnakkanlaut tidak dianjurkan mengambil proyek karena sangat berisiko. "Padahal bantuan ini sangat bagus. Tapi, *njemak gae* (mengambil pekerjaan, *Red*) berisiko. Takutnya malah Tipikor yang datang," seloroh pejabat asli Kuta ini.

Kendati demikian, Badra mengaku kembali mengusulkan agar Pantai Kedonganan mendapat bantuan tahun depan. Menurut dia, jika proyek kembali disetujui, maka akhir tahun saat pembahasan ABPN pihaknya akan dipanggil ke Jakarta. Dia pun yakin proyek penataan Pantai Kedonganan bisa mendapat bantuan. "Proyek Kedonganan Minapolitan ini untuk mendukung program kemaritiman Pak Jokowi. Mudah-mudahan tahun depan dapat bantuan lagi," tukasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pantai Kedonganan (BPKP2K), selaku lembaga perpanjangan tangan Desa Adat Kedonganan merencanakan konsep Minapolitan dan Minawisata.

Wisatawan akan berwisata sambil melihat panorama konsep minapolitan. Apalagi aktifitas nelayan tradisional dari segi pariwisata sangat mempunyai nilai tarik tersendiri. Sejumlah perubahan di kawasan pesisir, utamanya pada titik utara pantai juga sudah dirancang. Mulai dari pemindahan dan penambahan jumlah balai penimbangan hingga pembuatan parkir baru Aktivitas nelayan, dipastikannya merupakan suatu hal yang tidak akan dikesampingkan walau penataan tersebut dilakukan. **(san/rid)**

Edisi : Senin, 19 Oktober 2015
Hal. : 31